



RENCANA KERJA TAHUN 2024



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SINGKAWANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024 dapat tersusun sesuai rencana. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) dan berdasarkan Pasal 147 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD berpedoman pada arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu kepada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang ini kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024, dan juga sebagai



dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Singkawang, 28 Maret 2023

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG**



BOSNI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIR. 19630606 198603 1 030



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	9
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	21
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJADINAS TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD	21
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD	29
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD	33
2.4 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	36
2.5 PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	44
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD	45
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	45
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD	47
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	50
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	55
BAB V. PENUTUP	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun memuat program, kegiatan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024 ini disusun mengacu pada Rancangan Prioritas Pembangunan Kota Singkawang Tahun 2024. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi Renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis



kinerja pelayanan Perangkat Daerah, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51); serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kota Singkawang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja, dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/491/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Tahun 2024 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



14. Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;



24. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perubahan atas Peraturan Daerah kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Catatan Sipil;
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
27. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
28. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota



Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 113);

29. Peraturan Wali Kota Nomor 15 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 Tanggal 25 Maret 2022 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 15).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi Tahun 2024. Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024 adalah untuk merumuskan



Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024, beserta rencana anggaran tahunan secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/anggaran daerah yang tersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan serta program prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama tahun 2024;
- b. Mengukur capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;



- c. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
- d. Diperolehnya program/kegiatan prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun 2024 guna mewujudkan target dari tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
- e. Dokumen Renja yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.



BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (*tentang Capaian Indikator Program dan Kegiatan*)

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;



3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel dengan format tabel sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Ususan									
1 01	Bidang Ususan									
1 01 01	Program									
1 01 01 01	Kegiatan									
1 01 01 02	Kegiatan									
1 01 01 03	Dst									
1 01 02	Program									
1 01 02 01	Kegiatan									
1 01 02 02	Kegiatan									
1 01 02 03	Dst									
1 01 03	Program									
1 01 03 01	Kegiatan									
1 01 03 02	Kegiatan									
1 01 03 03	Dst									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (tentang Capaian Indikator Sasaran)

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.



Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (*hasil analisis dari sub bab sebelumnya*)

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan tabel berikut.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota*

Nama Perangkat Daerah:.....

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel sebagai berikut:

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ...

Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan tentang nama Program/Kegiatan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung agar tercapainya tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Singkawang;

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
dan Prakiraan Maju Tahun.....
Provinsi/Kabupaten/Kota
Nama Perangkat Daerah :
lembar dari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)



BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauhmana proses perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang merupakan tolok ukur untuk menilai sejauh mana pelaksanaan perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.



TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan 2023	
					Target RENJA PD Tahun 2022	Realisasi RENJA PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (TW-Ke 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2.06.01.	Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	-	100%	95,83%	95,83%	100%	12,72%	12,72%
2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Perangkat Daerah	400%	0%	100%	100%	100%	100%	75%	18,75%
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	2.500 Orang	1 Kali	1 Kali	100%	-	-	-
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	400%	100%	100%	100%	100%	100%	5,55%	1,39%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	100%	19 Orang	18 Orang	23,68%
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	4 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Laporan	0 Dokumen	0%
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-	100%	0%	0%
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	-	-	-	-	1 Paket	0 Paket	0%
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	200%	100%	100%	100%	100%	200%	0%	2%
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	100%	100%	100%	100%	1 Paket	0 Paket	0%
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	100%	100%	100%	100%	3 Paket	0 Paket	0%
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	100%	100%	100%	100%	2 Paket	0 Paket	0%
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	144 Dokumen	100%	100%	100%	100%	36 Dokumen	6 Dokumen	4,17%



2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	100%	100%	100%	100%	12 Laporan	2 Laporan	4,17%
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	0%	0%
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	52 Unit	-	28 Unit	28 Unit	100%	3 Unit	0 Unit	0%
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	21 Unit	4 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	4 Unit	0 Unit	0%
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400%	83,33%	100%	100%	100%	100%	11,11%	2,78%
2.12.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 Laporan	50%	100%	100%	100%	4 Laporan	0 Laporan	0%
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	48 Laporan	100%	100%	100%	100%	12 Laporan	2 Laporan	4,17%
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 Laporan	100%	100%	100%	100%	12 Laporan	2 Laporan	4,17%
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400%	100%	100%	100%	100%	100%	6,94%	1,74%
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	100%	100%	100%	100%	2 Unit	1 Unit	0%
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	310 Unit	39 Unit	57 Unit	57 Unit	100%	56 Unit	0 Unit	0%
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara	4 Unit	100%	120M ²	120M ²	100%	1 Unit	-	0%



2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran penduduk	400%	257,46	100%	187,06%	187,06%	100%	72,63%	18,16%
2.12.02.2.01	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk	27 Jenis Layanan	168,47%	100%	145,30%	145,30%	27 Jenis Layanan	15 Jenis Layanan	55,56%
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	69.250 Dokumen	Perekaman KTP-el 5.329, KK yang diterbitkan 9.203, KTP-el yang diterbitkan 15.679 dan KIA yang diterbitkan 7.874	Perekaman KTP-el 5.000, KK yang diterbitkan 1.466, KTP-el yang diterbitkan 9.544 dan KIA yang diterbitkan 6.000	Perekaman KTP-el 24.816, KK yang diterbitkan 3.719, KTP-el yang diterbitkan 9.544 dan KIA yang diterbitkan 7.423	187,06%	17.050 Dokumen	2.556 Dokumen	3,69%
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	34.600 Dokumen	1.599 KK, 1.478 KTP-el dan 42 KIA	1.505 KK, 940 KTP-el dan 400 KIA	1.912 KK, 1.603 KTP-el dan 43 KIA	102,78%	8.500 Dokumen	900 Dokumen	2,60%
2.12.02.1.02	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penataan pendaftaran Penduduk	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
2.12.02.1.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	16 Paket	-	-	-	-	4 Paket	0 Paket	0%
2.12.02.1.03	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
2.12.02.1.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	4 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	400%	278,68%	100%	302,87%	302,87%	100%	91,38%	22,85%



2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil	21 Jenis Layanan	232,63%	100%	290,92%	290,92%	21 Jenis Layanan	17 Jenis Layanan	80,95%
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	26.249 Dokumen	700 Dok Perkawinan, 49 Dok Perceraian, 299 Dokumen Perubahan Status Anak, 2 Dok Kewarganegaraan Ganda Terbatas, 66 Dok Kutipan Kedua Perkawinan, Perceraian, Catatan Pinggir, Perubahan Nama dan Peristiwa Penting Lainnya	615 Dok Perkawinan, 19 Dok Perceraian, 162 Dokumen Perubahan Status Anak, 3 Dok Kewarganegaraan Ganda Terbatas, 20 Dok Kutipan Kedua Perkawinan, Perceraian, Catatan Pinggir, Perubahan Nama dan Peristiwa Penting Lainnya	798 Dok Perkawinan, 63 Dok Perceraian, 208 Dokumen Perubahan Status Anak, 1 Dok Kewarganegaraan Ganda Terbatas, 146 Dok Kutipan Kedua Perkawinan, Perceraian, Catatan Pinggir, Perubahan Nama dan Peristiwa Penting Lainnya	270,61%	6.258 Dokumen	453 Dokumen	7,24%
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	8 Layanan	-5.672 Dokumen Akta Perkawinan, 1.032 Dokumen Akta Kematian, dan 230 Dokumen Kutipan Akta Kedua	4.795 Dokumen Akta Kelahiran, 175 Dokumen Akta Kematian, dan 255 Dokumen Kutipan Akta Kedua	5.665 Dokumen Akta Kelahiran, 1.106 Dokumen Akta Kematian, dan 468 Dokumen Kutipan Akta Kedua	311,22%	2 Layanan	0 Layanan	0%
2.12.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
2.12.03.2.02.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan	0 Laporan	0%
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan Skala Kab/Kota dan Persentase Lembaga Pengguna Yang Memanfaatkan data kependudukan	400%	-	-	-	100%	100%	0%	0%



2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang telah melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Jumlah sarana dan prasarana SIAK yang terpelihara	100%	100%	100%	90%	90%	100%	0%	0%
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen	5 Perangkat Daerah / Lembaga Pengguna	5 Perangkat Daerah / Lembaga	4 Perangkat Daerah / Lembaga	80%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	Cakupan Inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	1 Laporan	0 Laporan	0%
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	8 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	-	-	-	-	0 Laporan	0 Laporan	0%
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	8 Dokumen	14 Buku	2 Buku	2 Buku	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



2.12.05.2.01	Penyusunan Profil kependudukan	Cakupan penyusunan Profil Kependudukan	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4 Buku	-	-	-	-	1 Buku	0 Buku	0%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51); serta berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kota Singkawang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja, dan berdasarkan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor 061/491/SETDA.OR-A Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Dalam satuannya sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menyelenggarakan fungsi :



- a) Perumusan program kerja dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b) Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pelayanan pendafatran penduduk, pembinaan pencatatan sipil, pembinaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pembinaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- c) Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pelayanan pendafatran penduduk, pembinaan pencatatan sipil, pembinaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pembinaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- d) Penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pembinaan pelayanan pendafatraan penduduk, pembinaan pencatatan sipil, pembinaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pembinaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan pelayanan pendafatraan penduduk, pembinaan pencatatan sipil, pembinaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pembinaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan pelayanan pendafatraan penduduk, pembinaan pencatatan sipil, pembinaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pembinaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

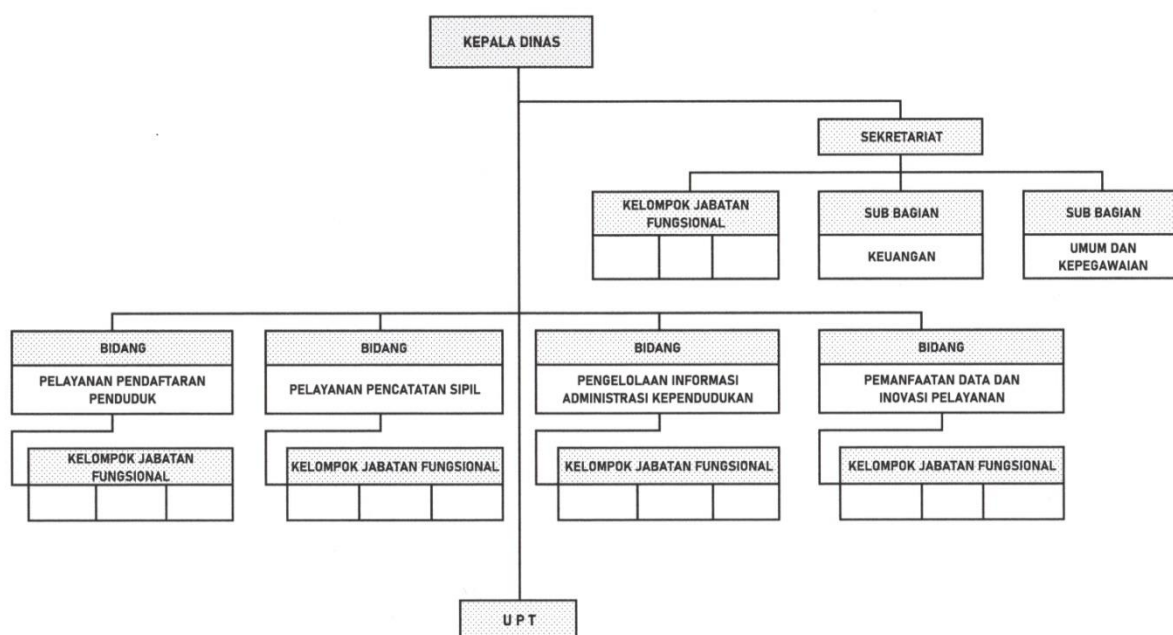


- g) Pelaksanaan reformasi, birokrasi, Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik dilingkungan Dinas;
- h) Pelaksanaan administrasi dilingkungan Dinas, dan;
- i) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, dengan gambaran Struktur Organisasi sebagai berikut.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG Nomor 113 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG





Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang telah tertuang didalam RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2023-2026 terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah dibawah ini.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra pada Tahun				Realisasi Capaian pada Tahun		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	Tahun 2022 (Tahun n-2)	Tahun 2023 (Tahun n-1)	Tahun 2024 (Tahun n)	Tahun 2025 (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Perekaman	-	-	-	97%	97,50%	98%	96,04%	96,26%	97,50%	98%	-
2.	Persentase Kepemilikan KTP elektronik	-	-	97%	98,70%	98,80%	98,90%	82,31%	82,31%	98,80%	98,90%	-
3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	70%	70%	75%	80%	50,42%	53,96%	75%	80%	-
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	-	-	92,50%	98,20%	98,40%	98,60%	93,21%	94,82%	98,40%	98,60%	-
5.	Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	-	-	Sudah	25%	35%	45%	-	0,24%	35%	45%	-
6.	Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	-	-	-	19 OPD	20 OPD	21 OPD	18 OPD	18 OPD	19 OPD	21 OPD	-
7.	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	-	BB	BB	-
8.	Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	-	BB	BB	-

(**) Data hasil pencetakan dari Pusat.

(**) Data DKB kondisi 31 Desember 2022



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

Isu-isu selalu berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan fungsi suatu institusi, baik lingkup internal maupun eksternal. Isu-isu strategis dapat mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu perlu disikapi dan dikaji untuk keberlangsungan penyelenggaraan roda organisasi.

Isu-isu strategis dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Isu-Isu Strategis dimaksud memerlukan perhatian, karena terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan.

Dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, terdapat isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yaitu pelayanan publik belum secara nyata menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal baik pelayanan dasar maupun pelayanan penunjang. Maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :



Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya meningkatkan animo masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah telah mengalami perubahan cukup besar melalui pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan.

Sistem informasi administrasi kependudukan dilaksanakan secara online dan terintegrasi dengan database kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri serta terintegrasi pula dengan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota lain, terutama dalam penerbitan dokumen kependudukan secara elektronik yaitu KTP elektronik dan Kartu Keluarga. Penerbitan dokumen kependudukan merupakan salah satu sasaran jangka menengah dari Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 dalam urusan kependudukan dan pencatatan melalui pengelolaan sistem informasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu-isu strategis, sebagai berikut:

1. Tinggi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, akurat dan gratis;



2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kepemilikan Akta Kelahirannya;
3. Manfaat nyata kepemilikan Kartu Identitas Anak belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat;
4. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dari masyarakat, antara lain pelaporan kelahiran, kematian dan perubahan biodata kependudukan sehingga data Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak akurat;
5. Masih banyak Lembaga Pengguna yang belum memahami akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan.

Permasalahan yang menjadi isu strategis tersebut, terfokus pada peningkatan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, terfokus pada :

1. Peningkatan integritas, kualitas, kuantitas (SDM), serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;
2. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang administrasi kependudukan;
3. Peningkatan melalui pelayanan keliling/jemput bola dan melakukan pemetaan kepemilikan Kartu Identitas Anak usia 0-17 tahun;
4. Peningkatan pengetahuan Lembaga Pengguna tentang manfaat yang didapat dari Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang secara keseluruhan, hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KOTA SINGKAWANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukcapil	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	4.833.281.961,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dukcapil	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	5.743.281.961,00	
2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukcapil	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukcapil	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	16.000.000,00	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukcapil	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukcapil	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	1 Dokumen	4.000.000,00	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukcapil	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukcapil	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dukcapil	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Dukcapil	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukcapil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukcapil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.000.000,00	



2.12.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukcapil	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.293.267.261,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dukcapil	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.293.267.261,00	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dukcapil	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	3.160.017.261	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dukcapil	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	3.160.017.261	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	128.250.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	128.250.000	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	
2.12.01.2.025	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dukcapil	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	23.050.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Skw	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	23.050.000,00	
2.12.01.2.025.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dukcapil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	23.050.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Skw	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	23.050.000	
2.12.01.2.026	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukcapil	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	352.046.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukcapil	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	352.046.000,00	
2.12.01.2.026.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukcapil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	16.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukcapil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	16.000.000	
2.12.01.2.026.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dukcapil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	111.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dukcapil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	111.500.000	
2.12.01.2.026.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dukcapil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	19.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dukcapil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	19.500.000	



2.12.01.2.026.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dukcapil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	36 Dokumen	5.046.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dukcapil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	36 Dokumen	5.046.000	
2.12.01.2.026.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukcapil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukcapil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000	
2.12.01.2.027	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukcapil	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	104.168.700,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukcapil	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	104.168.700	
2.12.01.2.027.05	Pengadaan Mebel	Dukcapil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	35.368.700	Pengadaan Mebel	Dukcapil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 Unit	35.368.700	
2.12.01.2.027.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dukcapil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	68.800.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dukcapil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	68.800.000	
2.12.01.2.028	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukcapil	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	863.600.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukcapil	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	863.600.000,00	
2.12.01.2.028.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Dukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	15.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Dukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	15.000.000	
2.12.01.2.028.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	259.850.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Dukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	259.850.000	
2.12.01.2.028.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	588.750.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	588.750.000	
2.12.01.2.029	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukcapil	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	181.150.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dukcapil	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.091.150.000,00	



2.12.01.2.029.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Skw	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	74.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Skw	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	74.400.000	
2.12.01.2.029.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dukcapil	Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	60 Unit	36.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dukcapil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	139 Unit	146.750.000	
2.12.01.2.029.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dukcapil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Rehabilitasi	1 Unit	70.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dukcapil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	870.000.000	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	440.356.000,00	Program Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	440.356.000,00	
2.12.02.201	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk	27 Jenis Layanan (Perpres 96 Tahun 2018)	40.356.000,00	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk	27 Jenis Layanan (Perpres 96 Tahun 2018)	40.356.000,00	
2.12.02.201.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Pendudukan	17.250 Dokumen	18.100.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	17.050 Dokumen	18.100.000	
2.12.02.201.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Kependudukan	8.600 Dokumen	22.256.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Kependudukan	8.500 Dokumen	22.256.000	
2.12.02.202	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Cakupan Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	373.500.000	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Cakupan Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	373.500.000	
2.12.02.202.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	4 Paket	373.500.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	4 Paket	373.500.000	



2.12.02.203	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	26.500.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dukcapil	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	26.500.000	
2.12.02.203.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota SKW	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	26.500.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota SKW	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	26.500.000	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Dukcapil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	109.878.000,00	Program Pencatatan Sipil	Dukcapil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	109.787.205,00	
2.12.03.201	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil	21 Jenis Layanan (Perpres 96 Tahun 2018)	97.358.000,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil	21 Jenis Layanan (Perpres 96 Tahun 2018)	97.357.205,00	
2.12.03.201.01	Pencatatan, Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6.483 Dokumen	62.358.000	Pencatatan, Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6.483 Dokumen	62.357.205	
2.12.03.201.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 Layanan	35.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2 Layanan	35.000.000	
2.12.03.202	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Skw	Cakupan Pasangan yang mencatatkan Perkawinan	100%	12.520.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Skw	Cakupan Pasangan yang mencatatkan Perkawinan	100%	12.430.000	
2.12.03.202.06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Kota Skw	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	12.520.000	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Kota Skw	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	12.430.000	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Skw	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	100%	197.000.000,00	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Skw	Persentase Fasilitas Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	100%	242.000.000	
			Persentase OPD yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan	100%				Persentase OPD yang telah menandatangani Perjanjian Kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan	100%		



2.12.04.201	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Skw	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh OPD	1 Laporan	125.000.000,00	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Skw	Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh OPD	1 Laporan	20.000.000,00	
2.12.04.201.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	110.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-	0	
2.12.04.201.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Skw	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	15.000.000	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Skw	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	20.000.000	
2.12.04.203	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Cakupan Penyusunan dan Pelaporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan Yang Disajikan	100%	72.000.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Cakupan Penyusunan dan Pelaporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan Yang Disajikan	100%	222.000.000,00	
			Cakupan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%				Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50 Orang		
								Cakupan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%		
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	1 Laporan	45.000.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dukcapil	Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	1 Laporan	45.000.000	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota SKW	Terselenggaranya Kegiatan Rakor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	2 Dokumen	17.000.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota SKW	Terselenggaranya Kegiatan Rakor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	2 Dokumen	117.000.000	



	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota SKW	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	0	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota SKW	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	50.000.000	
2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	Kota SKW	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	2 Dokumen	10.000.000	Penyajian Data Kependudukan Yang akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	Kota SKW	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	2 Dokumen	10.000.000	
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dukcapil	Persentase Penyajian Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	100%	15.000.000	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dukcapil	Persentase Penyajian Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	100%	15.000.000	
2.12.05.201	Penyusunan Profil kependudukan	Dukcapil	Cakupan Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang disusun	100%	15.000.000	Penyusunan Profil kependudukan	Dukcapil	Cakupan Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang disusun	100%	15.000.000	
2.12.05.201.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dukcapil	Jumlah Dokumen Profil Perkembangan kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dukcapil	Jumlah Dokumen Profil Perkembangan kependudukan serta kebutuhan yang lain	1 Dokumen	15.000.000	
TOTAL					5.595.515.961,00					6.550.425.166,00	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kota Singkawang. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan RENJA dengan kesepakatan hasil musrenbang Kota di Kecamatan.

Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi, maupun dari Perangkat Daerah yang ada di Kota Singkawang. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan hanya bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan.

Usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 KOTA SINGKAWANG

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	NIHIL				



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

A. Telaahan terhadap RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian dalam Negeri tahun 2020-2024.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri terutama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 yang dirumuskan secara umum sebagai berikut:

“Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN7)”

Ini merupakan agenda prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 (PN7), dalam rangka pencapaian Prioritas nasional 7 (tujuh), kementerian dalam negeri menetapkan 3 (tiga) tujuan, yang berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah terdapat pada tujuan ke-2 (dua);

“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”



Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

“Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8)”

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- a. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

Dengan arah kebijakan fokus pada :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.
2. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur dilingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah.



3. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
4. Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan datacenter SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. sesuai dengan Program Prioritas yang akan ditempuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun 2024 terdapat 4 program prioritas antara lain, yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan tujuan ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.***



Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah untuk dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Untuk mewujudkan tujuan “ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** ” maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menetapkan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran pertama “ **Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** ” dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 1. Persentase Perekaman;
 2. Persentase Kepemilikan KTP-elektronik;
 3. Rasio Kepemilikan kartu Identitas Anak (KIA);
 4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun.
2. Sasaran kedua “ **Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan Elektronik dan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna**” dengan indikator sasaran sebagai berikut :
 1. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD);



2. Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;

3. Sasaran ketiga “ **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** ” dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
2. Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2022	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				Target Kondisi Akhir Tahun 2026
					2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	86%	87%	88%	90%	90%
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Perekaman	96,04%	97%	97,50%	98%	99%	99%
			Persentase Kepemilikan KTP elektronik	82,31%	98,70%	98,80%	98,90%	99%	99%
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	50,42%	70%	75%	80%	85%	85%
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	93,21%	98,20%	98,40%	98,60%	98,80%	98,80%
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan Elektronik dan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pengguna	Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	-	25%	35%	45%	55%	55%
			Pemanfaatan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	18 OPD	1 OPD	1 OPD	1 OPD	1 OPD	4 OPD
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB

(**) Data hasil pencetakan dari Pusat.

(**) Data DKB kondisi 31 Desember 2022



3.3 Program dan Kegiatan

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024 adalah tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Singkawang, adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program

Adapun program yang akan dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pendaftaran Penduduk.
3. Program Pencatatan Sipil.
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

2. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka tahun 2023 akan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.



- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ✓ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

- ✓ Pengadaan Mebel;
- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.



f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- ✓ Penyediaan jasa surat menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Pendaftaran Penduduk meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;

- ✓ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
- ✓ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk ;

- ✓ Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan



c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;

- ✓ Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk

3) Program Pencatatan Sipil meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil;

- ✓ Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- ✓ Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- ✓ Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil

4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;

- ✓ Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
- ✓ Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

- ✓ Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- ✓ Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
- ✓ Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan



- ✓ Penyajian Data Kependudukan Yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan

5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan meliputi kegiatan :

a. Kegiatan Penyusunan Profil kependudukan;

- ✓ Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tahun 2024, tetap mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain target, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun 2024 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel dibawah ini.



RANCANGAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting (Bagian Pelaksanaan)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Dana	Jumlah Dana Menurut Program		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		100%		5.743.281.961			5.025.456.400
2.12.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	16.000.000			100%	16.000.000
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Dukcapil	1 Dokumen	4.000.000		Sekretariat	1 Dokumen	4.000.000
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Dukcapil	1 Dokumen	4.000.000		Sekretariat	1 Dokumen	4.000.000
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Dukcapil	1 Dokumen	4.000.000		Sekretariat	1 Dokumen	4.000.000
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Dukcapil	1 Laporan	4.000.000		Sekretariat	1 Laporan	4.000.000
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.293.267.261			100%	3.335.100.600
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Dukcapil	21 Orang/Bulan	3.160.017.261		Sekretariat	21 Orang/Bulan	3.200.050.600
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Dukcapil	4 Dokumen	128.250.000		Sekretariat	4 Dokumen	130.050.000
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Dukcapil	1 Laporan	5.000.000		Sekretariat	1 Laporan	5.000.000
2.12.01.2.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	23.050.000			100%	14.400.000
2.12.01.2.02.5.02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Dukcapil	1 Paket (Pakaian PDH 25 Stel)	23.050.000		Sekretariat	1 Paket (Pakaian Kopri 25 Stel)	14.400.000
2.12.01.2.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	352.046.000			100%	352.546.000
2.12.01.2.02.6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dinas Dukcapil	1 Paket	16.000.000		Sekretariat	12 Bulan	16.000.000
2.12.01.2.02.6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Dukcapil	3 Paket	111.500.000		Sekretariat	3 Paket	111.500.000
2.12.01.2.02.6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Dukcapil	2 Paket	19.500.000		Sekretariat	2 Paket	20.000.000
2.12.01.2.02.6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dinas Dukcapil	36 Dokumen	5.046.000		Sekretariat	36 Dokumen	5.046.000
2.12.01.2.02.6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Dukcapil	12 Laporan	200.000.000		Sekretariat	12 Laporan	200.000.000



2.12.01.2.027	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	104.168.700			100%	114.759.800
2.12.01.2.027.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Dinas Dukcapil	13 Unit	35.368.700		Sekretariat	11 Unit	35.403.600
2.12.01.2.027.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Dinas Dukcapil	6 Unit	68.800.000		Sekretariat	6 Unit	79.356.200
2.12.01.2.028	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	863.600.000			100%	895.450.000
2.12.01.2.028.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Dukcapil	4 Laporan	15.000.000		Sekretariat	4 Laporan	16.500.000
2.12.01.2.028.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Dinas Dukcapil	12 Laporan	259.850.000		Sekretariat	12 Laporan	289.450.000
2.12.01.2.028.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Dukcapil	12 Laporan	588.750.000		Sekretariat	12 Laporan	589.500.000
2.12.01.2.029	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.091.150.000			100%	297.200.000
2.12.01.2.029.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Dukcapil	2 Unit	74.400.000		Sekretariat	2 Unit	75.450.000
2.12.01.2.029.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin lainnya yang dipelihara	Dinas Dukcapil	139 Unit	146.750.000		Sekretariat	139 Unit	151.750.000
2.12.01.2.029.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / Rehabilitasi	Dinas Dukcapil	1 Unit	870.000.000		Sekretariat	1 Unit	70.000.000
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil	100%		440.356.000		100%	440.395.000
2.12.02.2.201	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk (27 Jenis Layanan Perpres 96 Tahun 2018)		27 Jenis Layanan (100%)	40.356.000			100%	40.395.000
2.12.02.2.201.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Pendudukan	Dinas Dukcapil	17.250 Dokumen	18.100.000		Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	17.500 Dokumen	18.150.000
2.12.02.2.201.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Kependudukan	Dinas Dukcapil	8.600 Dokumen	22.256.000		Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8.700 Dokumen	22.245.000
2.12.02.202	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penataan Pendaftaran Penduduk		100%	373.500.000			100%	372.500.000
2.12.02.2.202.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Dinas Dukcapil	4 Paket	373.500.000		Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Paket	372.500.000
2.12.02.203	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil	100%	26.500.000			100%	27.500.000
2.12.2.2.203.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil	1 Laporan	26.500.000		bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	27.500.000



2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil	100%		109.787.205			109.878.000
2.12.03.201	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil 21 Jenis Layanan (Perpres 96 Tahun 2018)		21 Jenis Layanan (100%)	97.357.205			100%	97.428.000
2.12.03.201.01	Pencatatan, Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Dukcapil	6.483 Dokumen	62.357.205		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	6.663 Dokumen	62.428.000
2.12.03.201.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil	2 Layanan	35.000.000		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	2 Layanan	35.000.000
2.12.03.202	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Pasangan yang mencatatkan Perkawinan	Dinas Dukcapil	100%	12.430.000		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	12.450.000
2.12.13.202.06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil	1 Laporan	12.430.000		Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	12.450.000
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	100%		242.000.000		100%	243.000.000
		Persentase OPD yang telah menandatangani Perjanjian kerjasama terkait pemanfaatan data kependudukan		100%				100%	
2.12.04.201	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan fasilitas Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana sesuai ketentuan		-	20.000.000			-	20.000.000
		Jumlah Laporan Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh OPD		1 Laporan				2 OPD	
2.12.04.201.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dinas Dukcapil	-	0		Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	0
2.12.04.201.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data kependudukan	Dinas Dukcapil	1 Dokumen	20.000.000		Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	1 Dokumen	20.000.000
2.12.04.203	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penyusunan dan Pelaporan Penyelenggaraan Informasi Administrasi Kependudukan Yang Disajikan	Dinas Dukcapil	100%		222.000.000	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	223.000.000
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		50 Orang				50 Orang	
		Cakupan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		100%			Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	100%	
2.12.04.203.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Hasil Fasilitasi Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	1 Laporan	45.000.000		Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	1 Laporan	45.000.000
2.12.04.203.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota SKW	2 Dokumen	117.000.000		Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	2 Dokumen	118.000.000
2.12.04.203.05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	1 Laporan	50.000.000		Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	50.000.000
2.12.04.203.08	Penyajian Data Kependudukan Yang akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Dinas Dukcapil	2 Dokumen	10.000.000		Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	10.000.000



2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyajian Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan		100%		15.000.000		100%	15.000.000
2.12.05.201	Kegiatan Penyusunan Profil kependudukan	Cakupan Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang disusun		100%	15.000.000			100%	15.000.000
2.12.05.201.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Perkembangan kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dinas Dukcapil	1 Dokumen	15.000.000		Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	15.000.000
						6.550.425.166			5.833.729.400



BAB V PENUTUP

Sebagaimana amanat dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah harus menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dengan demikian ada keselarasan antara setiap dokumen perencanaan. Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.



Keberhasilan pelaksanaan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan. Rencana Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian dari semua pihak serta dukungan anggaran yang memadai. Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar seluruh Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap melakukan koordinasi kepada instansi terkait untuk mengantisipasi besarnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, transparan dan adil.

Singkawang, 28 Maret 2023

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG**



BOSNI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIR.19630606 198603 1 030